



INDEKS BERITA ■ ■ ■

6

Reforma Agraria,
Kedaulatan Benih,
Kedaulatan Pangan Bisa
Dimulai Dari Desa

7

Jangan Bicara Tentang
Petani Jika Tidak
Melibatkan Petani

10

Bunga Rampai Aksi
Petani SPI Rayakan
#HariTaniNasional



"Dengan organisasi tani yang kuat, petani akan memiliki posisi tawar yang kuat"

Wagimin
Majelis Wilayah Petani (MWP) SPI Sumut

Hari Pangan Sedunia 2016 : Harga Pangan Melambung, Impor Pangan Meningkatkan, Jumlah Petani Terus Menurun



JAKARTA. Peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober, senantiasa dibayangi oleh kekhawatiran dan ancaman bencana kelaparan. Menurut laporan Global Hunger Index tahun 2016 yang baru dirilis pada bulan ini, masih terdapat 795 juta orang (10,6 % dari jumlah penduduk bumi) yang tidur dalam keadaan lapar. Di sisi lain, WHO menyebutkan bahwa terdapat 1,6 miliar orang yang kelebihan berat badan serta 600 juta orang mengalami obesitas. Simak selengkapnya di halaman 2. Foto oleh: Zulfie Herwinsyah

Hari Pangan Sedunia 2016 : Harga Pangan Melambung, Impor Pangan Meningkatkan, Jumlah Petani Terus Menurun



JAKARTA. Peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober, senantiasa dibayangi oleh kekhawatiran dan ancaman bencana kelaparan. Menurut laporan *Global Hunger Index* tahun 2016 yang baru dirilis pada bulan ini, masih terdapat 795 juta orang (10,6 % dari jumlah penduduk bumi) yang tidur dalam keadaan lapar. Di sisi lain, WHO menyebutkan bahwa terdapat 1,6 miliar orang yang kelebihan berat badan serta 600 juta orang mengalami obesitas.

"Ini artinya kelaparan terjadi bukan karena tidak cukupnya produksi pangan di seluruh dunia, melainkan disebabkan oleh ketimpangan distribusi pangan, ketidakmampuan memproduksi (ketiadaan tanah untuk menanam) serta ketidakmampuan untuk membeli pangan," kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) di Medan, pagi ini.

Sementara itu, senada dengan gejolak harga pangan dunia, harga bahan-bahan pangan di tingkat konsumen di dalam negeri rata-rata mengalami tren kenaikan secara konstan selama delapan tahun terakhir.

"Selama 2009 - 2016, harga beras naik 58,65 %, harga kedelai impor naik sebesar 36,3%, harga telur ayam ras mencapai kenaikan 80,6 %, harga gula pasir naik 68,4 %, harga bawang merah naik 168 %, harga daging sapi naik 90,4 %," papar Henry.

Impor Melambung

Kebijakan impor pangan masih berlanjut dengan dalih untuk mengendalikan harga pangan. Impor pangan terus meningkat tajam. Impor beras yang sempat turun di tahun 2013, kembali naik sepanjang tahun.

"Hingga Juli 2016 saja, angka impor beras telah menembus 1,09 juta ton melampaui impor beras sepanjang tahun 2015 sebesar 0,86 juta ton," tutur Henry.

Selain beras, jumlah impor gandum terus meningkat. Sejak Januari hingga Juni 2016 saja, angka impor gandum telah menembus 5,85 juta ton. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan impor gandum Indonesia tahun 2016 akan mencapai angka 8,10 juta ton.

"Dengan impor sebanyak itu, Indonesia merupakan importir gandum terbesar nomor dua di dunia setelah Mesir yakni 11,50 juta ton," katanya.

Impor kedelai turut meningkat dari 5,77 juta ton pada 2012 menjadi 6,41 juta ton di tahun 2015, meski sempat turun di tahun 2013. Sama halnya dengan impor jagung yang naik secara konstan sepanjang 2012 hingga 2015 sebesar 84%, dari 1,92 juta ton menjadi 3,5 juta ton.

Jumlah Petani Berkurang 2,54 Juta dalam Dua Tahun

Di balik gencarnya upaya Kementerian Pertanian mendorong produksi pangan, jutaan petani malah meninggalkan profesinya. Dalam dua tahun terakhir jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian turun sebesar 2,54 juta orang (6,22 %) dari 40,83 juta pada



Februari 2014 menjadi 38,29 juta orang pada Februari 2016.[1]

Menurut Henry, berkurangnya jumlah petani tersebut disebabkan tiga faktor. Pertama profesi petani tidak mampu dijadikan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga beralih ke profesi lain. Kedua, petani terpaksa meninggalkan profesi petani dikarenakan tidak lagi memiliki lahan pertanian untuk diusahakan, baik itu disebabkan pengusiran akibat konflik agraria maupun desakan ekonomi untuk menggadaikan atau menjual tanahnya. Ketiga, buruh tani harus tersingkir akibat kebijakan mekanisasi pertanian yang gencar dilakukan oleh kementerian pertanian.

"Ketiga faktor tersebut tersebut memiliki akar permasalahan yang sama, yakni tidak adanya jaminan perlindungan dari negara terhadap petani," tegas Henry.

Henry menerangkan, minimnya perlindungan harga terhadap petani pangan, khususnya padi dapat dilihat dari kebijakan HPP yang ditetapkan pemerintah. Penetapan HPP selama ini dianggap tidak layak karena tidak sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Akibatnya terdapat disparitas harga yang jauh antara HPP dan harga jual petani.

"Sepanjang tahun 2008 hingga 2016, penetapan HPP hanya naik 68,1%, dari Rp.2.200/Kg menjadi Rp.3.700/Kg. Sementara aktual di lapangan, naiknya harga-harga input pertanian telah mendongkrak harga jual padi sebesar 97,6%, dari Rp.2.792/Kg menjadi Rp.5.518/Kg. Sehingga kebijakan HPP tidak signifikan dalam memberikan jaminan harga, karena tidak sesuai dengan kondisi aktual yang dihadapi petani di lapangan," paparnya.

Kembali ke Hakikat Kedaulatan Pangan

Jargon kedaulatan pangan yang kini didengungkan pemerintah telah mengingkari makna hakiki dari konsep kedaulatan pangan. Berbagai kementerian berlomba-lomba menggembar gemborkan kedaulatan pangan, tanpa memahami makna sejatinya kedaulatan pangan. Pada akhirnya arah kebijakan yang diambil tak jauh dari aroma kepentingan modal dan pasar, hanya menyematkan kata 'kedaulatan pangan' yang telah dimanipulasi. Untuk menggenjot produksi pangan, Kementerian Pertanian berambisi untuk melanjutkan mega proyek food estate, dan serangkaian kebijakan untuk menggelar investasi agribisnis di sektor pangan. Kementerian Perdagangan terus membuka keran impor pangan meski tidak pernah terbukti mampu menurunkan harga pangan. Bulog semakin berambisi menjadi importir pangan layaknya kartel impor pangan, dan tercerabut dari akar sejarahnya. Sementara Kemenkoperekonomian dan kementerian lainnya hanya memandang urusan pangan semata-mata soal inflasi dan stabilitas politik.

"Hal inilah yang menyebabkan rangkaian peristiwa terus meningkatnya impor pangan, harga-harga pangan yang kian melambung serta terus berkurangnya jumlah petani," tegas Henry.

Henry menyampaikan, sudah selayaknya pemerintah menegaskan kiblatnya dalam urusan kebijakan pangan, menghadap kepentingan pasar (neoliberal) atau kedaulatan pangan yang sejati.

"Jangan memanipulasi rakyat dengan slogan kedaulatan pangan, namun arah yang dituju adalah sebaliknya (berlawanan arah)," lanjutnya.

Oleh karena itu Henry mengharapkan pemerintah dan jajaran kabinetnya untuk mengoreksi kesalahan atas kebijakan yang dijalankan saat ini.

"Pemerintah harus letakkan petani sebagai tulang punggung tegaknya kedaulatan pangan. Dengan demikian segala kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan harus utamakan kesejahteraan keluarga petani pangan, serta menjauhkan perusahaan agribisnis untuk menguasai sektor pangan."

"Reforma agraria sejati dijalankan, redistribusikan tanah kepada petani kecil tak bertanah, terutama kepada petani pangan. Ini janji Jokowi-JK saat kampanyenya."

"Masifkan praktek pertanian agroekologi yang ramah lingkungan, untuk menciptakan kemandirian petani dan melepaskan petani dari kartel perusahaan input pertanian, sesuai dengan program desa berdaulat benih yang tercantum dalam nawacita. Perbaiki tata kelola Bulog dan Toko Tani Indonesia dengan membangun pasar lokal sesuai nawacita."

"Segera bentuk Badan Pangan Nasional (amanat UU No. 18/2012 tentang pangan) yang mencerminkan peran dan kewenangan yang sesuai dengan mandat untuk mewujudkan kedaulatan pangan," tutup Henry. ###

Petani SPI Rayakan #HariTaniNasional2016 di Sukabumi, Serang, Padang, dan Merangin

SUKABUMI. Seluruh petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2016 di masing-masing wilayahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, ratusan petani SPI bersama dengan elemen mahasiswa dan lembaga lainnya yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) melakukan aksi damai, long march menuju kantor Perhutani Sukabumi (22/09).

Bunbun Kusnadi, salah seorang petani SPI asal Desa Pasir Datar Indah, Kecamatan Caringin menyampaikan, selain memperingati HTN 2016, aksi ini juga menuntut penyelesaian konflik agraria dengan PT Surya Nusa.

"Kami meminta pihak BPN dan Perhutani untuk berpihak kepada kami petani kecil. Di atas lahan eks HGU PT Surya Nusa kami telah menanam sayur mayur yang sekali panennya mencapai 25 hingga 30 ton dan berhasil menegakkan kedaulatan pangan di Sukabumi," kata Bunbun.

"Kami telah menguasai lahan ini lebih dari 18 tahun," ungkap Bunbun lagi.



Aksi merayakan Hari Tani Nasional di Serang, Banten

Serang

Dari Serang, Banten, ratusan petani anggota SPI, mahasiswa, dan organisasi lain yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Banten (PRB) melakukan aksi di depan gedung DPRD Banten, di Serang, tadi pagi (26/09).

Perwakilan SPI Banten, Asep Sunandar menyampaikan aksi ini untuk mendesak pemerintahan Banten untuk menuntaskan konflik agraria yang masih banyak terjadi di Banten.

"Di Hari Tani Nasional 2016 ini kami ingin meminta pemerintah untuk mengeluarkan Perda-Perda serta kebijakan yang pro ke petani kecil," tutur Asep.

Padang

Dari Ranah Minang, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera Barat (Sumbar) menggelar diskusi media bertemakan "Laksanakan Reforma Agraria Sejati Untuk Mewujudkan Pangan Sehat Keluarga Petani dan Konsumen", Sabtu, 24 September 2016.

Rustam Effendi, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumbar menyampaikan agar pemerintah jangan lagi mengajak tokoh adat, masyarakat adat, untuk menyerahkan lahannya kepada pemerintah yang kemudian menjadi Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan sawit. Ini tentu saja membuat masyarakat tidak lagi memiliki lahan.



Aksi merayakan Hari Tani Nasional di Sukabumi.

"Akibatnya terjadi konflik antara petani dengan perusahaan. Pemerintah seharusnya memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk menggarap lahannya," kata Rustam.

Merangin

Dari Desa Sanda, Kecamatan Lembah Mesurai, Kabupaten Merangin, Jambi, ratusan petani SPI merayakan HTN 2016 dengan melakukan rapat akbar petani yang terdiri atas upacara bendera, pesta rakyat, dan lainnya.

Ahmad Azhari, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Merangin menyampaikan, acara rapat akbar ini dilakukan selama dua hari 23 -24 September 2016.

"Pada malam hari kita melakukan acara nonton bareng tentang film dokumentasi perjuangan petani SPI," kata Azhari.

Azhari menambahkan, tepat pada 24 September 2016, Hari Tani Nasional, para peserta melakukan upacara bendera di atas lahan perjuangan.

"Kita sudah buktikan kalau reforma agraria sejati mampu membangun kehidupan, contohnya ya di Desa Sanda ini," kata Azhari.

Rapat akbar di Merangin juga ditandai dengan penyerahan solidaritas untuk pembangunan dan pengembangan sekolah petani SPI di Desa Sanda oleh para donatur dari beragam wilayah di Indonesia. ###



Aksi merayakan Hari Tani Nasional di Merangin, Jambi.

Reforma Agraria, Kedaulatan Benih, Kedaulatan Pangan Bisa Dimulai Dari Desa



Foto: Ketua Departemen Politik Hukum dan HAM Badan Pengurus Pusat (BPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Indra Sago.

JAKARTA. Reforma agraria, kedaulatan benih, kedaulatan pangan bisa dimulai dari desa. Hal ini diutarakan Ketua Departemen Politik Hukum dan HAM Badan Pengurus Pusat (BPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Indra Sago di Jakarta (05/10).

Dalam diskusi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa ini Indra Sago menyampaikan masalah yang dihadapi petani di pedesaan saat ini yakni ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah oleh petani. Hal ini menyebabkan jumlah keluarga petani terus menurun.

"Dalam dua tahun pemerintahannya saja Jokowi-JK sudah "mengurangi" jumlah petani sebanyak 2.45 juta jiwa yang mayoritas berasal dari desa," kata Indra Sago.

"Ini artinya Jokowi-JK sendiri belum melaksanakan nawacitanya," lanjutnya.

Indra Sago melanjutkan, untuk reforma agraria contohnya, SPI telah mendirikan beberapa kampung reforma agraria yang menjadikan desa sebagai sentranya.

"Kampung reforma agraria ini tentu saja berhasil memakmurkan ekonomi rakyat desa karena kampung reforma agraria yang dibangun petani SPI terdiri atas lahan pertanian untuk berproduksi, perumahan untuk petani, hingga fasilitas umum seperti musholla, lapangan, dan lain sebagainya," papar Sago.

Selanjutnya untuk kedaulatan benih, konsep desa berdaulat benih yang ada dalam nawacita Jokowi-JK juga belum dijalankan.

"Yang terjadi malah benih dikuasai oleh korporasi, untuk benih lokal sangat sulit syarat-syarat yang ditentukan Kementan. Padahal petani penangkar kita punya keterampilan menangkarkan benih turun menurun yang mampu melestarikan dan mengembangkan benih-benih lokal," kata Sago lagi.

Indra Sago menambahkan, untuk kedaulatan pangan, desa memang menjadi kunci utama. Namun yang terjadi, desa seolah pasif dalam memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan petani. Desa hanya sekedar urusan administratif.

"Jika petani kecil didukung, disediakan lahan untuk bertani, kebutuhan pangan desa akan terpenuhi dan kedaulatan pangan tercapai," tambahnya. ###



Jangan Bicara Tentang Petani Jika Tidak Melibatkan Petani: Pertemuan Benih Sedunia ITPGRFA



Foto: Pertemuan benih sedunia La Via Campesina

BALI. Delegasi yang terdiri atas petani kecil (perempuan dan laki-laki), masyarakat adat dan pemuda tani dari berbagai wilayah di dunia mewakili La Via Campesina (organisasi petani internasional) pada Konsultasi Global tentang Hak Asasi Petani, yang diadakan 27-30 September di Bali. Konsultasi global ini diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dengan dukungan dari Pemerintah Norwegia dan Sekretariat Perjanjian Internasional Sumberdaya Hayati atas Pangan dan Pertanian (ITPGRFA).

Adapun yang menjadi tuan rumah acara ini adalah Serikat Petani Indonesia (SPI) dengan peserta yang berasal dari Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Latin.

ITPGRFA yang tergabung dalam FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) — meskipun telah eksis selama beberapa dekade — masih sangat sedikit berbuat untuk mengedepankan dan memajukan hak asasi petani, salah satu ketetapan pokok di dalamnya.

Dalam hal ini, delegasi petani kecil pedesaan dan masyarakat adat yang mewakili La Via Campesina mendesak pihak ITPGRFA dan pihak-pihak (pemerintah) untuk mengakui dan melaksanakan hak asasi petani, menolak undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), paten yang membahayakan kedaulatan pangan.

Benih yang dilestarikan dan disimpan petani dari lahannya adalah salah satu pilar tak tergantikan dari produksi pangan. Petani kecil di seluruh dunia telah menyadari hal ini selama berabad-abad. Ini adalah salah satu pemahaman yang paling universal dan paling dasar yang dipahami tiap petani. Kecuali dalam kasus-kasus di mana mereka telah menderita agresi eksternal atau keadaan ekstrim, hampir semua masyarakat petani tahu bagaimana cara menyimpan, melestarikan, menangkarkan dan berbagi bibit. Jutaan keluarga dan masyarakat tani telah bekerja untuk menciptakan ratusan bahkan ribuan varietas tanaman ini. Pertukaran benih antar komunitas dan masyarakat telah memungkinkan tanaman untuk beradaptasi dengan kondisi iklim dan topografi yang berbeda. Inilah yang menyebabkan pertanian menyebar dan berkembang, dan memberi makan masyarakat dunia.

Aksi Petani SPI Rayakan #HariTaniNasional2016 di Serdang Bedagai, Kampar, Lampung, dan Samarinda



Aksi merayakan Hari Tani Nasional di Serdang Bedagai, Sumatera Utara

SERDANG BEDAGAI. Seribu-an petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, melakukan aksi long march menuju kantor Bupati (26/09). Jekson Purba perwakilan petani SPI menyampaikan aksi ini dilakukan untuk merayakan peringatan Hari Tani Nasional (HTN) yang setiap tahunnya jatuh di tanggal 24 September.

"Selain untuk memperingati HTN, aksi ini juga kami lakukan untuk mendorong Bupati Serdang Bedagai beserta jajaran SKPD-nya untuk menuntaskan konflik agraria yang kami alami," kata Jekson di kantor Bupati Serdang Bedagai.

"Kami di Desa Pamah, Serdang Bedagai, sekarang terdesak dan hidup dalam kemiskinan karena tidak punya lahan untuk bertani. Lahan seluas 250 hektar dirampas oleh PT Cinta Raja sejak puluhan tahun lalu, dan sampai sekarang tidak ada langkah penyelesaian yang berpihak kepada kita," papar Jekson.

Kampar

Dari Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, ratusan petani SPI merayakan HTN 2016 dengan melakukan berbagai kegiatan. Perwakilan SPI Riau Misngadi menyampaikan, petani SPI melakukan doa bersama dan penanaman tanaman pangan serta buah-buahan di atas lahan perjuangan.

"Peringatan HTN 2016 kali ini kami rayakan dengan melakukan refleksi dan konsolidasi internal," kata Misngadi.

Lampung

Dari Pringsewu, Lampung, ratusan petani SPI Lampung melaksanakan pesta rakyat dan syukuran panen raya di lahan pertanian agroekologi SPI Lampung di Desa Kresno Joyo, Kecamatan Ambarawa (24/09).

Muhlasin, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Lampung menyampaikan acara diisi dengan tasyakuran dan kenduri karena berhasil panen melimpah beberapa waktu yang lalu.

"Melalui acara ini kami mengkampanyekan dan mensosialisasikan tentang pertanian agroekologi yang sudah diterapkan kader SPI dalam bertani. Dengan menerapkan sistem agroekologi hasil pertanian jadi jauh lebih maksimal dibandingkan dengan pertanian konvensional. Dan yang paling penting, agroekologi membuat petani berdaulat," papar Muhlasin.



Aksi merayakan Hari Tani Nasional di Lampung

Muhlasin melanjutkan, acara ini juga mensosialisasikan mengenai pentingnya petani merayakan Hari Tani Nasional.

"Undangan yang datang bukan hanya petani anggota SPI, tapi petani lain, masyarakat umum, hingga para pejabat daerah seperti Sekretaris Dinas Pertanian Pringsewu, Camat, KUPT, dan lainnya," imbuhnya.

"Ternyata masih banyak teman-teman petani yang di luar SPI, apalagi yang tidak berorganisasi, yang tidak mengetahui adanya Hari Tani Nasional ini. Padahal HTN adalah hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang jadi dasar reforma agraria yang bisa mensejahterakan petani," papar Muhlasin.

Samarinda

Dari Samarinda, Kalimantan Timur, puluhan petani SPI bersama mahasiswa dari GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) melakukan aksi *long march* menuju kantor DPRD di Balikpapan (24/09).

Perwakilan SPI Kalimantan Timur Hidayat mengemukakan, selain memperingati HTN 2016, aksi ini juga dilakukan untuk meminta pemerintah berpihak kepada kepentingan petani kecil.

"Kami meminta pemerintah menerbitkan perda turunan dari Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlitan) yang bisa menjamin kesejahteraan petani kecil. Kami juga meminta pemerintah daerah untuk menjamin pasar bagi produk-produk petani lokal dan menolak impor pangan," ungkapnya.

Aksi ini sendiri diterima oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Tohari Aziz, Ketua Komisi II Abdul Yajid, Anggota Komisi I Budiono, dan lainnya.

###



Aksi merayakan Hari Tani Nasional di Samarinda.

Bunga Rampai Aksi Petani SPI Rayakan #HariTaniNasional di Pasaman Barat, Jambi, dan Kendari



Aksi merayakan Hari Tani Nasional di Pasaman Barat

PASAMAN BARAT. Seribuan petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) melakukan long march dan aksi damai menuju kantor Bupati (27/09/2016).

Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Pasaman Barat Januardi menyatakan, dalam aksi memperingati Hari Tani Nasional 2016 ini, massa petani SPI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi. Selain itu, sampai saat ini persoalan tanah ulayat yang dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan belum mampu memakmurkan petani. Termasuk plasma petani dengan sistem bapak angkat, belum semua berjalan dengan benar. Dampaknya, hasil plasma yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak sesuai perjanjian awal.

"Banyak perusahaan kelapa sawit yang menjalankan Hak Guna Usaha (HGU) tidak sesuai perjanjian awal dan merugikan masyarakat. Banyaknya perusahaan perkebunan sawit di Pasbar belum memberikan manfaat bagi petani. Buktinya, petani umumnya belum sejahtera," kata Januardi.

"Misalnya, di Mandiangin Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali masyarakat tidak mendapatkan hak plasma dengan semestinya. Padahal kalau berkaca mata pada perjanjian awal sekitar 409 hektar plasma bisa dinikmati petani. Namun realisasi di lapangan hanya janji belaka. Parahnya, sejak tahun 1996 lalu sampai sekarang, justru masyarakat selalu dirugikan. Kami berharap bupati sekarang bisa menyelesaikan persoalan petani ini," harapnya.

"Di sinilah urgensinya reforma agraria itu dijalankan dan diwujudkan dalam perda-perda," tegas Januardi.

Jambi

Dari Jambi, seribuan petani melakukan aksi damai ke empat titik, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jambi, Dinas Kehutanan Jambi, kantor Gubernur, dan DPRD Provinsi Jambi.

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jambi Sarwadi Sukiman menyampaikan pemerintah seharusnya ikut memperingati HTN karena ini sudah diatur melalui Kepres No. 169 Tahun 1963 oleh Presiden Soekarno.

"Karena pemerintah alpa memperingatinya kamilah yang memperingatinya sebagai petani," kata Sarwadi pada saat melaksanakan upacara simbolis merayakan HTN 2016 di kantor BPN di Jambi (27/09).

Sarwadi melanjutkan, aksi ini juga dilakukan untuk mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria sejati.

"Reforma agraria sejati itu ya meredistribusikan lahan seluas 9 juta hektar kepada petani tak bertanah, buruh tani, dan petani penggarap. Jangan diartikan macam-macam, jangan dibelokkan kemana-mana," tegas Sarwadi.

Sarwadi pun mendesak pemerintah Provinsi Jambi untuk menyelesaikan konflik agraria dan menetapkan lahan-lahan perjuangan yang sudah dikuasai petani menjadi TORA (tanah objek reforma agraria).

Kendari

Dari Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), petani SPI yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Reforma Agraria (AMARA) melakukan aksi memperingati HTN 2016 di kantor BPN dan DPRD Sultra (27/09).



Aksi merayakan Hari Tani Nasional di Jambi

Koordinator aksi Syamsuduha menyampaikan, aksi ini juga menuntut pemerintah mencabut izin perusahaan yang bermasalah, moratorium perluasan perkebunan dan pertambangan, dan penghentian monopoli dan perampasan tanah dan kriminalisasi terhadap kaum tani dan seluruh rakyat serta menurunkan biaya produksi pertanian.

"Misalnya adalah konflik yang terjadi di UPT Arongo ada pengusuran lahan produktif masyarakat transmigrasi Arongo Kecamatan Ranomeeto Barat oleh PT Merbau Jaya Indah Grup," ungkapnya.

"Selanjutnya, dalam pembentukan tim penyelesaian permasalahan, ormas tani, lembaga, dan masyarakat petani menginginkan untuk dilibatkan," sambungnya.

Syamsuduha juga menyampaikan, dalam menyelesaikan segera semua konflik agraria yang terjadi di Sultra juga harus melibatkan perempuan dalam proses penyelesaiannya serta mempertimbangkan situasi, kebutuhan, dan kepentingan khusus perempuan, termasuk dalam hal proses pemulihan.

"Dengan adanya pengusuran lahan yang dilakukan PT Merbau, yang merasakan dampaknya itu kami para ibu, susah dalam mendapatkan air bersih, terjadi banjir saat musim hujan, kesehatan yang terganggu, kami meminta perlindungan," kata Tusni Widya Astuti, perwakilan petani perempuan UPT Arongo Desa Laikangdonga, Kabupaten Konsel.



Aksi merayakan Hari Tani Nasional di Kendari

#HariTaniNasional2016: Ragam Perayaannya oleh Petani SPI di Semarang, Kulonprogo, Surabaya, dan Mataram



Aksi merayakan Hari Tani Nasional di Jawa Tengah

“Sampai hari ini Jawa tengah belum melakukan sesuatu yang berarti terhadap penyelesaian permasalahan isu sektoral baik itu lingkungan maupun konflik agraria,” ucapnya.

Kulonprogo

Dari Kulonprogo, DPW SPI Yogyakarta memperingati HTN 2016 dengan melakukan rembug tani di Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo (27/09/2016).

Tri Haryono, Ketua BPW SPI Yogyakarta menyampaikan, rembug tani ini secara khusus berusaha mengkonsolidasikan masyarakat tani di Kulonprogo dan di Yogyakarta pada umumnya.

“Hadir dalam acara ini Teater Bumi Menoreh, dan Romo Nangsir dari Wahana Belajar Petani Yogyakarta yang banyak berbagi mengenai permasalahan petani dan pertanian,” kata Tri.

Tri juga mengutarakan, rekomendasi dari rembug tani ini adalah pembuatan sentra benih yang bisa mengakomodir kebutuhan benih se-Kulonprogo.

“Kita ingin petani se-Kulonprogo berdaulat benih,” ucapnya.

Tri menambahkan, rekomendasi lainnya adalah memperbanyak pendidikan petani ke petani dan membuat sistem pangan komunitas.

Surabaya

Memperingati HTN 2016, DPW SPI Jawa Timur yang tergabung dalam Aliansi Tani Jawa Timur (ALIT JATI) mengadakan acara aksi Longmarch dari menuju Kantor Wilayah Badan Pertanian Nasional (Kanwil BPN) Jawa Timur dan berakhir di Kantor Dinas Pertanian Jatim, Selasa (27/09/2016).

Nurhadi Zaini, Ketua BPW SPI Jawa Timur menegaskan, Hari Tani Nasional (HTN) yang diperingati setiap tanggal 24 September merupakan hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Hari tani sendiri diterapkan melalui Kepres 169 tahun 1963.

Ia menyampaikan, massa menuntut empat hal kepada pemerintah. Pertama, segera laksanakan reforma agraria sejati. Kedua, tuntaskan konflik-konflik agraria. Ketiga, tegakkan kedaulatan pangan. Dan keempat, tolak korporasi pertanian.

“Reforma agraria sejati tanah untuk petani wajib segera dilaksanakan pemerintahan Jokowi-JK. Saat ini kemiskinan di pedesaan semakin luas karena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin timpang, belum lagi konflik-konflik agraria yang selalu menyengsarakan petani,” papar Nurhadi.

Selain SPI, ALIT JATI terdiri atas Aliansi Petani Indonesia (API), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), PMII UNSURI Surabaya, GMNI Surabaya, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Surabaya, Komunitas Cempaka UPN Veteran Jatim, Left Democratic Force (LDF) Surabaya, Laskar Mahasiswa Republik Indonesia (LAMRI) Surabaya, dan Cakrawala Timur.

SEMARANG. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Tengah (Jawa Tengah) memperingati HTN 206 dengan melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jateng di Semarang (27/09). SPI Jateng yang dalam aksi ini tergabung dalam Aliansi Tani dan Buruh Tani Mandiri Sejahtera Jawa Tengah (Tabur Masa) memulai aksi pada pukul 10.30 WIB dengan melakukan long march dari depan gedung Pramuka menuju depan kantor Gubernur Jateng.

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jateng Edi Sutrisno mengemukakan, aksi ini untuk mendesak pemerintahan Provinsi Jateng untuk serius menyelesaikan konflik agraria yang masih banyak terjadi di bumi Jateng.

“Peringatan Hari Tani Nasional tahun ini jadi momen yang sangat tepat untuk meminta kepada Bapak Gubernur agar dalam penyelesaian konflik agraria selalu berpihak kepada petani kecil,” kata Edi di depan ratusan massa aksi.

Edi menegaskan, massa aksi juga menolak pertambangan perusak lingkungan di Jawa tengah, menolak impor pangan yang hanya menguntungkan korporasi, mendesak pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan dari petani, dan meminta pemerintah provinsi untuk segera membentuk komite penyelesaian konflik agraria di Jawa Tengah.



Aksi merayakan Hari Tani Nasional di Yogyakarta

Mataram

Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), DPW SPI NTB yang tergabung Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTB memperingati HTN 2016 dengan melakukan aksi simpatik di halaman Gubernur NTB (26/09/2016). Udin perwakilan SPI NTB menyampaikan NTB adalah provinsi peringkat kedua paling tinggi di Indonesia yang mengirimkan buruh migran.

“Buruh migran mayoritas berasal dari desa. Ini berarti kehidupan di desa sebagai petani sudah semakin memprihatinkan. Ini sesuai dengan data terbaru BPS yang menyebutkan kalau kemiskinan di desa-desa semakin meningkat,” katanya.

Udin menambahkan, massa aksi juga meminta pemerintah dan pihak berwenang untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani kecil.

“Reforma agraria sejati harus segera dijalankan pemerintah pusat dan diadopsi oleh pemerintahan daerah, bukan reforma agraria palsu yang justru banyak mengakomodir kepentingan pemodal,” tutupnya.



Aksi merayakan Hari Tani Nasional di Kediri

TOLAK PERAMPASAN LAHAN!!!

Sambungan dari halaman 7



Indra Sago, mewakili perwakilan SPI dalam forum ITPGRFA

Oleh karena itu, petani harus diberi akses tak terbatas dan tanpa syarat untuk mengembangkan beragam jenis benih, memiliki hak untuk saling bertukar dan menjual benih antar sesamanya. Ini adalah syarat pertama yang diperlukan untuk memberi makan dunia. Untuk mempertahankan sistem benih berbasis petani kecil ini, dalam konsultasi tersebut, delegasi La Via Campesina akan berbicara tentang hak-hak asasi petani, untuk melindungi petani kecil, dan mempertahankannya dari propaganda hukum HKI.

Di sini, di Indonesia, tempat kegiatan ini berlangsung, petani di Jawa Timur telah dikriminalisasi karena diduga melanggar hak-hak sebuah perusahaan bernama BISI, anak perusahaan dari perusahaan benih Thailand, Charoen Pokhpand. Meskipun BISI tidak bisa menghadirkan bukti, petani telah dipanggil ke pengadilan dan empat belas dari mereka telah dituntut; bahkan sudah ada yang dipenjara [1]. Dalam kebanyakan kasus, para petani ini tidak memiliki pengacara untuk mewakili mereka dan mereka tidak mengerti mengapa yang mereka lakukan salah. Ada banyak contoh seperti ini di seluruh dunia, kriminalisasi petani oleh industri atas nama paten dan kekayaan intelektual. Ini adalah pelanggaran terang-terangan dari hak asasi petani.

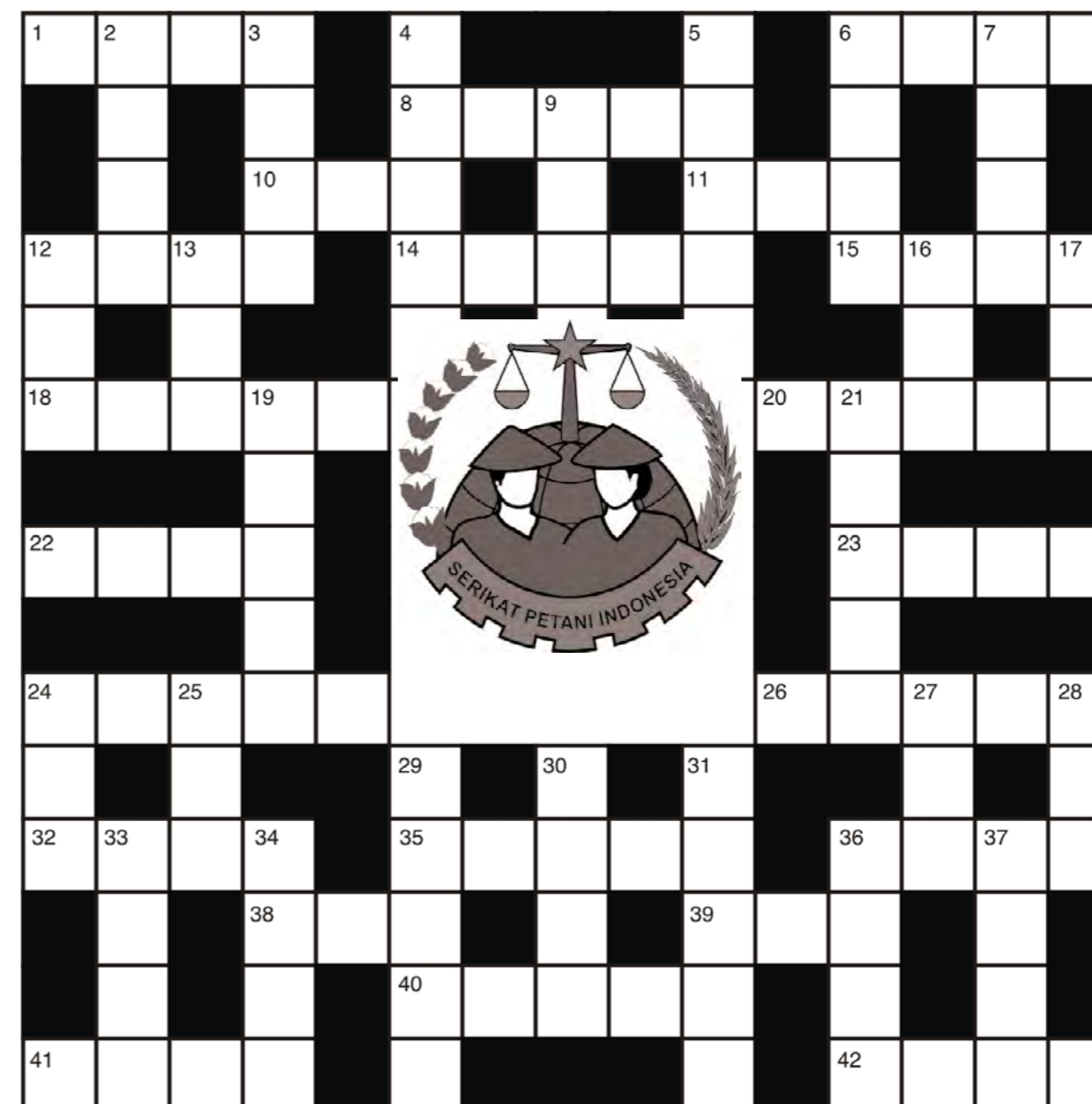
Delegasi La Via Campesina juga menekankan, partisipasi petani kecil dalam pengambilan keputusan tidak harus dikurangi karena masuknya beberapa organisasi yang tunduk pada tekanan korporasi dan menerima keputusan yang sudah dibuat. Selanjutnya, selain mengurangi keterlibatan para tuan tanah, forum dan kebijakan ini harus menyertakan perempuan, masyarakat adat, petani tak bertanah, pekerja pertanian yang tidak memiliki lahan, nelayan dan penggembala.

La Via Campesina mendesak ITPGRFA dan pihak-pihak terkait untuk melihat hukum progresif yang disahkan di berbagai wilayah dunia, yang terbaru adalah yang disahkan oleh Pemerintah Venezuela [2] awal tahun ini, yang menjunjung tinggi kedaulatan pangan nasional, mengatur produksi benih hibrida, dan menolak produksi, distribusi dan impor benih transgenik. Pemerintah Indonesia, Mali, Nepal dan beberapa lainnya telah mengadopsi kedaulatan pangan sebagai prinsip, beberapa dari mereka bahkan memberlakukan ini menjadi undang-undang (misalnya Indonesia).

Bersambung ke halaman 15

Sambungan dari hal. 14

TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 071

**MENDATAR**

1. Sejenis ikan laut 6. Tubuh, badan 8. Dokumen tertulis 10. Alat penumbuk padi
11. Sisa pembakaran 12. Hura-hara, keributan 14. Darah yang keluar dari rahim wanita yang baru melahirkan 15. Gembira karena hasrat telah dipenuhi 18. Peraturan yang mengikat 20. Pendapat
22. Hari pasaran Jawa 23. Tinggi rendahnya bunyi 24. Bibit 26. Mutlak dimiliki petani untuk mencapai kesejahteraan 32. Pasangan raja 35. Selalu menggunakan akal budi 36. Cocok, sesuai perhitungan
38. Senang 39. Zodiak berlambang singa 40. Angkutan umum 41. Rajin, ulet 42. Indah

MENURUN

2. Bebas dari bahaya 3. Saudara suami atau istri 4. Bangunan kecil seperti rumah di tengah sawah
5. Jarak antara huruf atau baris tulisan 6. Peroleh, ciduk 7. Bulir-bulir kristal berasa manis
9. Tempat duduk yang empuk 12. Ongkos Naik Haji 13. Anak Buah Kapal 16. Sejenis singkong
17. Organisasi tani kebanggaan kita 19. Sejumlah uang atau barang berharga yang wajib dibayarkan, biasanya bersifat menindas 21. Binatang khas Cina 24. Sejenis perkakas 25. Tangga nada
27. Sungai di Mesir 28. Harga Pembelian Pemerintah 29. Sejenis obat pembunuh jentik nyamuk
30. Sepeda motor sewaan 31. Keadaan hawa pada suatu daerah dalam jangka waktu yg agak lama
33. Tulen 34. Bagian di tubuh yg menyerupai benang 36. Daerah tujuan urbanisasi 37. Sumber penerangan dari bambu yang diisi minyak tanah dan ujungnya disumbat kain

La Via Campesina juga menuntut bahwa "Dana Benefit-Sharing" tidak harus membiayai lembaga penelitian dan lembaga lainnya yang ditujukan untuk mengumpulkan benih petani dan semacamnya dan informasi genetik lainnya yang ditujukan untuk memfasilitasi patenasi. Sebaliknya, dana tersebut harus langsung membiayai organisasi kecil petani yang menyeleksi, memproduksi dan melestarikan benih lokal mereka, lahan konservasi, ataupun teknologi jangka panjang (misalnya membangun daerah tanpa listrik). Peneliti yang berkolaborasi dalam kerja kolektif ini juga harus di bawah arahan petani, bisa juga dengan pertukaran kader petani pada tingkat nasional dan internasional.

[1] <https://www.grain.org/article/entries/5142-seed-laws-that-criminalise-farmers-resistance-and-fightback#4> Asia struggles
[2] <http://www.gmwatch.org/news/latest-news/16602-venezuela-passes-national-anti-gmo-and-anti-patent-seed-law>

Delegasi La Via Campesina di Bali :

Zimbabwe Small Holder Organic Farmers' Forum (ZIMSOFF), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA, Brazil), Movement for Land and Agriculture Reform (MONLAR, Srilanka), Serikat Petani Indonesia, Confédération Paysanne (France), Indian Coordination Committee of Farmers' Movements (ICCFM), Assembly of Poor (Thailand), Coordinador Nacional Agrario-CAN (Colombia).

Petani Bersatu Tak Bisa Dikalahkan

www.spi.or.id

Galeri Foto Hari Tani Nasional 2016 di Jakarta: Tolak Reforma Agraria Palsu



JAKARTA. Sepuluh ribuan petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) yang berasal dari Banten dan Jawa Barat bergabung dengan massa dari KNPA (Komite Nasional Pembaruan Agraria) memperingati Hari Tani Nasional 2016 dengan melakukan aksi damai, long march dari Mesjid Istiqlal menuju Istana Negara, Jakarta, Selasa 27 September 2016.

Henry Saragih Ketua Umum SPI menyampaikan, aksi ini untuk mengingatkan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla untuk melaksanakan janjinya kepada kaum tani se-Indonesia, melakukan reforma agraria, meredistribusi tanah seluas 9 juta hektar kepada petani tak bertanah, buruh tani, dan petani penggarap.

“Sudah hampir dua tahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan, tapi reforma agraria belum juga dilaksanakan. Malah ada upaya untuk membelokkan reforma agraria ke arah yang tidak pro rakyat kecil, yang palsu,” kata Henry.

Henry juga menyalahkan sikap istana yang menolak menerima massa aksi.

“Kita datang jauh-jauh, dari Banten, dari Jawa Barat, hendak mengingatkan presiden untuk tunaikan janjinya tapi ia menolak menerima kita. Ini artinya pemerintahan Jokowi-JK di tahun kedua pemerintahannya ini semakin menjauh dari petani kecil, dari rakyatnya,” papar Henry.

Aksi ini sendiri adalah bagian dari aksi sepekan Hari Tani Nasional 2016 yang dilakukan oleh petani SPI di seluruh wilayah Indonesia. ###

